

# STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MENGANTISIPASI PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Iga Sulandari

NPP. 31.0533

Asdaf Kota Padang, Provinsi  
Sumatera Barat Program Studi  
Politik Indonesia Terapan Email:  
[igasulandari@gmail.com](mailto:igasulandari@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Dr. Romi Saputra, S.Sos., M.Si

## ABSTRACT

**Problem/Background (GAP):** Increasing violations of the neutrality of state civil servants from 2018-2020 during elections in West Sumatra Province. The results of the Bawaslu report stated that the findings of cases of violations of ASN neutrality in West Sumatra Province occupy a fairly high position. In this regard, Bawaslu stated that West Sumatra Province is included in the 10 provinces with the highest vulnerability to ASN Neutrality issues in the 2024 Election. The high level of violations of civil servant neutrality resulting in the democratic process in West Sumatra Province not being optimal. As an institution that plays a role in supervising the democratic process in West Sumatra Province, Bawaslu of West Sumatra Province must have a strategy that can anticipate violations of the neutrality of the State Civil Service. **Method:** This research was conducted to explain the efforts of the West Sumatra Province General Election Supervisory Agency in anticipating violations of the neutrality of the State Civil Apparatus in the 2024 Election. **Method:** This type of research is descriptive with data collection through observation, interviews and documentation. **Results/Findings:** **Result/Findings:** of this research conclude that the efforts of the West Sumatra Province Bawaslu in anticipating violations of the neutrality of the State Civil Apparatus in West Sumatra Province are by being more creative in managing social media, holding outreach, improving the quality of human resources and developing election observation villages. **Conclusion:** With this research, the author hopes to be able to anticipate violations of the neutrality of the State Civil Apparatus on the basis of implementing good strategies from Bawaslu itself so that existing threats and obstacles can be minimized.

**Keywords:** Strategy, Neutrality of State Civil Apparatus, Violations

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Meningkatnya pelanggaran netralitas aparatur sipil negara dari tahun 2018-2020 pada pemilihan di Provinsi Sumatera Barat. Hasil laporan Bawaslu menyatakan bahwa temuan kasus pelanggaran netralitas ASN di Provinsi Sumatera Barat menempati posisi yang cukup tinggi, berkaitan dengan hal ini Bawaslu menyatakan Provinsi Sumatera Barat masuk ke dalam 10 Provinsi dengan kerawanan tertinggi isu Netralitas ASN pada Pemilu 2024. Tingginya tingkat pelanggaran netralitas Aparatur Sipil mengakibatkan proses demokrasi di Provinsi Sumatera Barat tidak optimal. Sebagai lembaga yang berperan dalam mengawasi proses demokrasi di Provinsi Sumatera Barat maka Bawaslu Provinsi Sumatera Barat harus memiliki strategi yang dapat mengantisipasi pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara. **Tujuan:** Penelitian ini diadakan guna menjelaskan bahwa upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam mengantisipasi pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilu 2024. **Metode:** Jenis penelitian tersebut adalah deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, upaya Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam mengantisipasi pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara di Provinsi Sumatera Barat pada dengan cara yang lebih kreatif dalam pengelolaan media sosial, mengadakan sosialisasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan Kampung Pengawasan pemilu. **Kesimpulan:** Dengan adanya penelitian ini penulis berharap bisa mengantisipasi terjadinya pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dengan dasar penerapan strategi yang baik dari Bawaslu itu sendiri sehingga dapat meminimalisir ancaman dan hambatan yang ada.

**Kata Kunci :** Strategi, Netralitas Aparatur Sipil Negara, Pelanggaran

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku Lembaga pengawasan pemilu sangat dibutuhkan guna mengatasi permasalahan yang sering terjadi di lapangan agar terwujud pemilihan bebas, terbuka dan jujur. Namun pada kenyataannya walaupun dibentuknya Bawaslu dalam realitanya masih banyak terjadi pelanggaran maupun kecurangan yang kerap terjadi dalam pelaksanaannya salah satunya ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN). Pada Pilkada Tahun 2018 di Sumatera Barat tercatat ada 7 pelanggaran netralitas ASN dari 491 pelanggaran yang terjadi Di Indonesia, Selanjutnya pada Pemilu tahun 2019 Jumlah Pengaduan yang diterima oleh KASN dan Bawaslu mencapai 914 pelanggaran dimana angka pelanggaran netralitas ASN Di Sumatera Barat sejumlah 16 pelanggaran. Selanjutnya Pada Pilkada Tahun 2020 terdapat 2.007 ASN yang dilaporkan melanggar netralitas,<sup>1</sup> hal tersebut berbanding lurus dengan angka pelanggaran netralitas ASN Sumatera Barat yang melonjak sangat tinggi menjadi 71 pelanggaran. Pelaksanaan pemilihan selama tahun 2018-

<sup>1</sup> "Bawaslu Bahas Konsep Penanganan Pelanggaran Netralitas Asn Dalam Pemilu," n.d., <https://bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-bahas-konsep-penanganan-pelanggaran-netralitas-asn-dalam-pemilu>.

2020 jumlah ASN yang melanggar setiap tahunnya selalu meningkat, hal tersebut patutnya menjadi perhatian utama yang harus di tindak lanjuti oleh Bawaslu Provinsi khususnya karena bertanggung jawab atas wilayahnya mencakup jajaran bawaslu yang ada dibawahnya. Dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2023 Pasal 31 ayat 1 berisi terkait pelaporan pelaksanaan kerja sama di wilayah kerja masing-masing dilakukan mulai dari Bawaslu Kabupaten/Kota.



Sumber : Bawaslu RI Tahun 2023

Hasil laporan Bawaslu menyatakan bahwa temuan kasus pelanggaran netralitas ASN di Provinsi Sumatera Barat menempati posisi yang cukup tinggi, berkaitan dengan hal ini bawaslu menyatakan Provinsi Sumatera Barat masuk ke dalam 10 Provinsi dengan kerawanan tertinggi isu Netralitas ASN pada Pemilu 2024.

Dalam hal ini Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sudah melakukan rangkaian langkah pencegahan Pelanggaran, antara Lain :

1. Menandatangani pakta integritas untuk menjaga Netralitas.<sup>2</sup>
2. pendeklarasian kampung pengawasan pemilu.<sup>3</sup>
3. Kegiatan penguatan kelembagaan.<sup>4</sup>
4. Kegiatan supervisi dan monitoring penyusunan kajian hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota.<sup>5</sup>
5. Bimbingan teknis penanganan pelanggaran Pemilu tahun<sup>6</sup>

<sup>2</sup> "Jaga Netralitas ASN Di Sumatera Barat, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Rangkul Kepala Daerah Tandatangani Pakta Integritas," accessed November 30, 2023, <https://sumbar.bawaslu.go.id/index.php/berita/page/207>.

<sup>3</sup> "Mengawasi Dari Tengah Samudera," accessed November 30, 2023, <https://sumbar.bawaslu.go.id/index.php/berita/page/260%0A>.

<sup>4</sup> "Bawaslu Sumatera Barat Adakan Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu," 2023, <https://sumbar.bawaslu.go.id/index.php/berita/page/256>.

<sup>5</sup> "Pentingnya Penyusunan Kajian Hukum, Bawaslu Provinsi Lakukan Supervisi Dan Monitoring Ke Bawaslu Kabupaten/Kota," n.d., <https://sumbar.bawaslu.go.id/index.php/berita/page/255>.

<sup>6</sup> "Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024," n.d., <https://sumbar.bawaslu.go.id/index.php/berita/page/254%0A>.

6. Sosialisasi Peraturan Bawaslu.<sup>7</sup>

7. Menyediakan pojok pengawasan, edukasi juga literasi dan lainnya.<sup>8</sup>

## 1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Tingginya tingkat pelanggaran Netralitas ASN di Provinsi Sumatera Barat tergolong tinggi hal ini dibuktikan dari perbandingan jumlah pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilihan Tahun 2018-2020 yang terus meningkat. Dalam pemilihan tersebut peneliti membandingkan pada tahun 2018 terdapat 7 pelanggaran, pada tahun 2019 terdapat 16 pelanggaran dan pada tahun 2020 terjadi lonjakan yang sangat tajam yaitu 71 pelanggaran netralitas ASN Di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dari tingginya tingkat pelanggaran yang terjadi memerlukan strategi khusus dalam mengantisipasi pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2024 di Provinsi Sumatera Barat tersebut. Dapat dilihat Hasil laporan Bawaslu menyatakan bahwa temuan kasus pelanggaran netralitas ASN di Provinsi Sumatera Barat menempati posisi yang cukup tinggi, berkaitan dengan hal ini Bawaslu menyatakan Provinsi Sumatera Barat masuk ke dalam 10 Provinsi dengan kerawanan tertinggi isu Netralitas ASN pada Pemilu 2024

## 1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian Maharani (2019) dengan judul *“Peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019”*. Penelitian terkait menggunakan teori Soekanto, tugas dan wewenang Bawaslu dilihat sebagai indikator peran yang dimilikinya. Pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode penelitian deskriptif. Observasi, dokumentasi, dan Teknik wawancara digunakan sebagai cara dalam memperoleh data terkait penelitian ini. Kurangnya sumber daya dan pengertian masyarakat menjadi hambatan yang dialami oleh Bawaslu NTB dalam mengawasi terlaksananya pemilu. Ja'far (2018) mengenai *“Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu”*. Peran Bawaslu untuk menangani sengketa pemilu merupakan tujuan dari penelitian ini. Studi kepustakaan digunakan dalam memperoleh data dan penelitian ini menggunakan metode yuridis normative. Mengawal dan mengawasi kelancaran jalannya pemilu merupakan peran penting Bawaslu, serta Bawaslu harus menangani proses sengketa dan pelanggaran pemilu. Sutrisno dengan judul penelitian *“Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah”*. Hasil penelitian ini berupa ketidak netralan ASN dalam Pilkada Surakarta kabupaten Seragen dan Kabupaten Bantul disebabkan dari sejumlah faktor kesetiaan ASN, ambisi karir jabatan, hubungan kekeluargaan, peraturan yang ambigu, rendahnya kesadaran masyarakat serta penegakan hukum yang lemah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Dhimas Satrio Hutomo (2018) dengan judul penelitian *“Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa Tengah (Studi Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018- 2023)”*. Bawaslu harus bekerja keras untuk menciptakan

<sup>7</sup> “Bawaslu Sumbar Gelar Sosialisasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024,” n.d., <https://sumbar.bawaslu.go.id/index.php/berita/page/244>.

<sup>8</sup> “BAWASLU SUMBAR, AJAK MEDIA KONTROL DAN EDUKASI POLITIK DI TENGAH MASYARAKAT,” n.d., <https://sumbar.bawaslu.go.id/index.php/berita/page/239>.

pemilihan yang ideal dan terhindara dari berbagai pelanggaran. Peneliti ingin meneliti tentang bagaimana peran bawaslu dalam mengawasi persiapan pilkada sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Bawaslu telah memiliki tugas, wewenang dan kedudukan yang kuat. Dea Asdita Putra dengan judul “*Efektivitas Fungsi Bawaslu Kota Malang dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018*”. Yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah pada kinerja Bawaslu Kota Malang dalam menyelenggarakan Pilkada serentak Tahun 2018 berikut juga dengan fakto-faktor yang penghambat yang dihadapi.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Ketimpangan antara jumlah ASN yang menurun berbanding terbalik dengan jumlah pelanggaran netralitas ASN yang meningkat pesat menjadi atensi khusus bagi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat agar agar dapat menindak lanjuti hal tersebut berikut juga dengan faktor yang mempengaruhi pesatnya kenaikan jumlah pelanggaran. Hasil laporan Bawaslu menyatakan bahwa temuan kasus pelanggaran netralitas ASN di Provinsi Sumatera Barat menempati posisi yang cukup tinggi, berkaitan dengan hal ini bawaslu menyatakan Provinsi Sumater barat masuk ke dalam 10 Provinsi dengan kerawanan tertinggi isu Netralitas ASN pada Pemilu 2024.

#### **1.5 Tujuan**

Berdasar pada latar belakang permasalahan, maka tujuan diadakannya penelitian ini, yaitu: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam mengantisipasi pelanggaran netralitas aparatur sipil negara pada Pemilu tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat, 2. Untuk mengetahui dan menganalisis *action plan* dari strategi prioritas Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam mengantisipasi pelanggaran netralitas aparatur sipil negara pada Pemilu tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat.

## **II. METODE**

Menurut Sugiyono (2014:9) penelitian pendekatan kualitatif berlandaskan pada filsafat pos-positivisme, yang diperuntukkan guna penelitian yang berfokus pada kondisi alamiah, yaitu penelitian tersebut menjadi kunci.<sup>9</sup> Creswell dan Hancock (2009) Penelitian kualitatif merupakan landasan untuk merujuk desain perspektif teoritis seperti penelitian narasi, fenomenologi, penelitian tindakan, studi kasus, etnografi, penelitian sejarah, dan analisis konten.<sup>10</sup> Sederhananya penelitian ini diperuntukkan guna meneliti permasalahan manusia dan social. Hasil penelitian nantinya akan dilaporkan berlandaskan data di lapangan yang di deskripsikan secara mendalam.<sup>11</sup> *Purposive sampling* dan *Snowball sampling* merupakan Teknik yang sering digunakan dalam memperoleh data penelitian. *Purposive sampling* merupakan teknik memperoleh data dengan menentukan sumber pengambilan data dengan mempertimbangkan kualifikasi narasumber terkait. *Snowball sampling* merupakan Teknik memperoleh data dari narasumber yang awalnya sedikit kemudian menjadi banyak karena kebutuhan akan

<sup>9</sup> D. Sugiono, P., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 2014.

<sup>10</sup> Yuliani, *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling* (Quanta, 2018).

<sup>11</sup> “<https://Penerbitdeepublish.Com/Metode-Penelitian-Kualitatif/>,” n.d.

sumber informasi yang semakin mendalam dengan narasumber yang general atau cenderung tidak memiliki kualifikasi spesifik terkait penelitian yang diteliti. pendekatan ini dipilih dengan harapan agar dapat menampilkan data yang realistis, aktual, dan akurat. Tujuannya guna menggambarkan beberapa variabel yang berhubungan dengan permasalahan yang ada sesuai kenyataan sosial yang ada.<sup>12</sup>

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Strategi Bawaslu dalam mengantisipasi pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2024 di Provinsi Sumatera Barat

Strategi menurut *Chandler* terbagi menjadi 3 dimensi yaitu formulasi dan sasaran jangka Panjang Panjang pemilihan tindakan, dan alokasi sumber daya yang dimana ketiganya saling bersinergi untuk menciptakan strategi yang optima. Menurut peneliti strategi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sudah terlaksana sesuai dengan banyak melakuakn Kerjasama antar instansi pemerintahan daerah dan masyarakat. Berikut strategi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam mengantisipasi pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2024 di Provinsi Sumatera Barat terbagi menjadi 3 dimensi yang masing-masing dimensi memiliki fungsi yang berbeda yaitu :

##### A. Formulasi dan Sasaran Jangka Panjang

Dimensi formula dan sasaran jangka Panjang menurut *Chandler* salah satunya adalah membentuk kampung pengawasan pemilu partisipasi di 19 Kabupaten Kota. Dalam satu kab/kot terdapat satu atau dua atau bahkan 3 titik bisa berbasis kecamatan/kelurahan/desa/nagari yang sudah dicanangkan kampung pengawasan partisipasi dan itu juga merupakan prioritas nasional yang masuk ke dalam rencana jangka menengah dari presiden. Tujuan kampung pengawasan bahwa Bawaslu ingin menghadirkan kantor Bawaslu itu di tengah masyarakat, selama ini hanya bermukim di kantor. Nah dengan dicanangkan itu masyarakat mudah untuk menyampaikan kepada Bawaslu, itu terbukti dengan berapa banyak surat yang berupa kritikan dan sebagainya. Artinya masyarakat sudah merespons itu dan menandakan adanya partisipasi aktif masyarakat untuk sama-sama mengawal proses demokrasi ini.

##### B. Pemilihan Tindakan

Dimensi pemilihan tindakan menurut *Chandler* salah satunya adalah melakukan sosialisasi langsung kepada ASN mulai dari jajaran Sekda kebawah. Jadi Bawaslu memberikan informasi, lalu menghadirkan semuanya dan dilakukan secara massif di 19 kabupaten/kota dari provinsi. Jadi di 20 titik di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat. Bawaslu juga melakukan hal yang sama kepada anggota di Panwascam (panitia tingkat kecamatan), jadi mereka datang camat / lurah bahkan saat apel-apel pagi kecamatan dan kantor lurah itu anggota Panwascam ini hadir sebagai sembari memberikan informasi. Proses sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan partisipan seluruh ASN dan lapisan masyarakat guna mengantisipasi terjadinya pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu Tahun 2024 dan memaksimalkan media sosial untuk menyebarkan informasi dan mengedukasi masyarakat dengan cara mengupload dan mengunduh hal yang

---

<sup>12</sup> Lilik Mulyadi, "Perlindungan Hukum Whistle-Blower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime Di Indonesia Masa Mendatang," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, no. 3 (2014): 578–97, <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a9>.

berhubungan tentang netralitas ASN.

### C. Alokasi Sumber Daya

Dimensi pemilihan tindakan menurut *Chandler* salah satunya adalah merancang serta menganalisis bagaimana ASN di Provinsi Sumatera Barat, apa saja budaya yang biasa dilakukan ASN sehingga Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tahu apa saja yang harus dilakukan dalam mengantisipasi pelanggaran netralitas ASN tersebut. Dari berbagai tim dan divisi yang ada maka dari bentuk kekuatan Bawaslu memiliki SDM yang memadai sehingga menandakan bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat ini memiliki kekuatan yang besar dan tim yang kuat sehingga dapat memuat kinerja yang penulis rasa cukup memenuhi tujuan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dibuktikan dengan kunjungan peneliti ke kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang melihat bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tertib dalam melaksanakan siklus administrasi dan memiliki pelayanan yang baik.

### **3.2 Hambatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam mengantisipasi pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2024**

Mekanisme Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk mengantisipasi pelanggaran netralitas ASN di Provinsi Sumatera Barat tentunya memiliki hambatan yang berasal dari luar dan harus diidentifikasi. dalam mengidentifikasi ancaman tersebut Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dapat menyusun sebuah strategi dimana strategi tersebut dapat mengendalikan. Dalam hal ini Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyatakan dalam wawancara: Hasil wawancara Bapak Alni selaku Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada hari Rabu, 31 Januari 2024.

“Kendalanya adalah kadang kita bawaslu ini sudah semangat betul untuk melakukan penindakan hukum netralitas ASN terkadang teman-teman karena perintah KASN untuk memerintahkan pejabat Pembina kepegawaian ini untuk memberikan sanksi kalau kata KASN ini pelanggaran sedang diberikan sanksi sedang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada kendala kalau seandainya netralitas yang dilakukan oleh ASN itu menguntungkan bagi pejabat Pembina kepegawaiannya dalam hal ini bupati/Walikota yang akan memberikan sanksi adalah beliau apalagi nanti dalam konteks Pilkada yang hal ini ASN pasti ditarik-tarik”

Hambatan yang ada diatas Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sedang menyusun program yang dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut walaupun pada saat ini Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sedang mengatasi dan menangani hambatan ini dengan sangat baik dan sudah banyak mengoptimalkan penyebaran informasi dalam media sosial yang dibuat semenarik mungkin, melakukan sosialisasi dari kantor dan masyarakat. Sehingga mengedukasi masyarakat dengan menggunakan kampung pengawasan pemilu sehingga masyarakat paham tentang pentingnya netralitas ASN dalam pesta demokrasi Di Provinsi Sumatera Barat.

### **3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Dalam mengantisipasi pelanggaran netralitas ASN, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengupayakan berbagai program dan pelaksanaan perencanaan agar pelanggaran netralitas ASN dapat diantisipasi . Hal ini dilakukan dalam bentuk bekerja sama antar lembaga pemerintah diantaranya ialah dalam meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat antara pihak Bawaslu dan pihak lainnya . Adanya koordinasi sebelumnya seperti mengkonfirmasi topik yang akan disampaikan. Dalam upaya yang dilakukan

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk mengantisipasi pelanggaran netralitas ASN Pada Pemilu 2024 melakukan beberapa kegiatan diantaranya ialah :

1. Sosialisasi oleh Bawaslu secara langsung maupun daring bekerja sama dengan Kesbangpol

Proses yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk mengantisipasi pelanggaran netralitas ASN melalui Sarana administrasi berupa surat himbauan kepada gubernur, bupati, Walikota dan jajaran, karena yang merupakan ASN adalah Sekda. Sekda ini adalah pemangku kepentingan paling tinggi di masing-masing wilayah. Bawaslu juga melakukan sosialisasi langsung kepada ASN mulai dari jajaran Sekda kebawah. Jadi Bawaslu memberikan informasi, lalu menghadirkan semuanya dan dilakukan secara massif di 19 kabupaten/kota dari provinsi. Jadi di 20 titik di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat. Bawaslu juga melakukan hal yang sama kepada anggota di Panwascam (panitia tingkat kecamatan), jadi mereka datang camat / lurah bahkan saat apel-apel pagi kecamatan dan kantor lurah itu anggota Panwascam ini hadir sebagai sembari memberikan informasi. Proses sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan partisipan seluruh ASN dan lapisan masyarakat guna mengantisipasi terjadinya pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu Tahun 2024.

2. Memaksimalkan Media Sosial dalam Menyebarkan Informasi dan Edukasi

Pada zaman sekarang, pengguna media sosial sangat meningkat pesat dimana pengguna media sosial dilakukan paling banyak remaja umur 12-30 tahun hal ini dapat memicu penyebaran informasi sangat pesat di seluruh kalangan. Dalam hal ini Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memanfaatkan hal tersebut dengan cara memanfaatkan media sosial dengan mengelola media sosial tersebut untuk menyebarkan informasi dan mengedukasi masyarakat dengan cara mengupload dan mengunduh hal yang berhubungan tentang netralitas ASN. Dalam hal ini anggota Divisi Pencegahan menyatakan dalam wawancara ;

Hasil wawancara Bapak Rimtho selaku anggota divisi pencegahan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada hari Kamis, 18 Januari 2024

“Publikasi medsos bawaslu, terutama ig, “ sekarang kan zamannya gen z ya kalau anak milenial itu bisa 8jam megang hp ya, nah makanya metodenya kami rubah sedikit menyasar ke kanal-kanal di media social. Biasanya kita kan dengan cara-cara konvensional ya, mengumpulkan orang ya, atau melalui pemberitaan-pemberitaan di media cetak. Yang lama tetap berjalan, melalui media cetak, baliho, spanduk. Tujuannya tidak hanya menyasar kaum milenial tetapi mayoritas orang sekarang sudah menggunakan gadget dalam kesehariannya.”

3. Kampung Pengawasan Pemilu

Kampung Pengawasan Pemilu hadir sebagai sebuah fasilitas yang dibuat oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat agar dapat diakses oleh masyarakat yang difungsikan sebagai pusat pengetahuan tentang pengawasan pemilihan umum. Dalam hal ini Kampung Pengawasan dapat dijadikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sebagai strategi jangka Panjang untuk mengawasi sekaligus mengantisipasi



terjadinya pelanggaran pada saat Pemilu termasuk pelanggaran netralitas ASN. Dalam hal ini Ketua Divisi Pencegahan menyatakan dalam wawancara ;

Hasil wawancara Bapak Khadafi selaku anggota divisi pencegahan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada hari Jumat, 26 Januari 2024.

“Tujuan dibentuknya Kampung Pengawasan tersebut untuk mengajak masyarakat agar responsive terhadap pengawasan partisipatif. Artinya mereka responsive terhadap “oh jika terjadi pelanggaran maka mereka mau menyampaikan ke kita, contoh hal sekarang inikan tahapan kampanye ya, salah satu metode kampanye itukan pemasangan alamat peraga kampanye. Beberapa hari yang lalu masuk surat yang mengatas namakan masyarakat bahwasanya “ini sudah bertebaran alat peraga kampanye yang melanggar” artinya sudah muncul peran partisipasi masyarakat dengan kita mensosialisasikan “oh, ayo melaporkan segala macam pelanggaran” artinya kan sudah ada muncul kesadaran masyarakat untuk berperan aktif sekalipun memang kita sudah melakukan penertiban dan upaya-upaya segala macam, tapi dengan informasi itu semakin banyak input kekita semakin bagus bagi bawaslu.”

Tujuan kampung pengawasan bahwa bawaslu ingin menghadirkan kantor bawaslu itu ditengah masyarakat, selama inikan hanya bermukim di kantor. Dengan adanya kampung pengawasan masyarakat mudah untuk menyampaikan kepada Bawaslu, itu terbukti dengan beberapa surat yang masuk berupa kritikan dan sebagainya. Artinya masyarakat sudah merespon itu dan menandakan adanya partisipasi aktif masyarakat untuk sama-sama mengawal proses deokrasi ini.

#### 4. Peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) di Lingkup Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Sumber Daya Manusia Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pun turut serta berperan aktif karena mereka juga anggota dari bawaslu yang berada di dalam Lembaga tersebut. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat guna mengantisipasi terjadinya pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2024 secara luas Bawaslu Provinsi Sumatera Barat membutuhkan kekuatan dari masyarakat sebagai relawan untuk membuat kekuatan di masyarakat agar masyarakat tersebut ikut dalam mengawasi serta mengantisipasi terjadinya pelanggaran dalam pemilihan umum dan aktif berpartisipasi politik untuk memajukan semangat demokrasi masyarakat.

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan peneliti yang menjelaskan mengenai strategi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam mengantisipasi pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2024 di Provinsi Sumatera Barat dapat disimpulkan bahwa;

### a. Formulasi dan Jangka Panjang

Membentuk kampung pengawasan pemilu partisipasi di 19 Kabupaten Kota. Tujuan kampung pengawasan bahwa Bawaslu ingin menghadirkan kantor Bawaslu itu di tengah masyarakat terbukti dengan berapa banyak surat yang berupa kritikan dan sebagainya.

### b. Pemilihan Tindakan

- Melakukan sosialisasi langsung kepada ASN mulai dari jajaran Sekda ke bawah. Bertujuan untuk meningkatkan partisipan seluruh ASN dan lapisan masyarakat guna mengantisipasi terjadinya pelanggaran netralitas ASN.
- Memaksimalkan media sosial untuk menyebarkan informasi dan mengedukasi

masyarakat dengan cara mengupload dan mengunduh hal yang berhubungan tentang netralitas ASN. melalui media social sangat berdampak positif guna mengantisipasi terjadinya pelanggaran karena dapat menjangkau lebih banyak responden dan minim biaya sehingga cara ini dirasa sangat optimal untuk dilakukan.

c. Alokasi Sumber Daya

Bawaslu memiliki SDM yang memadai sehingga menandakan bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat ini memiliki kekuatan yang besar dan tim yang kuat sehingga dapat memuat kinerja yang penulis rasa cukup memenuhi tujuan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dibuktikan dengan kunjungan peneliti ke kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang melihat bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tertib dalam melaksanakan siklus administrasi dan memiliki pelayanan yang baik.

**Keterbatasan Penelitian:** Analisis data yang kurang tajam menjadi kelemahan dalam hasil penelitian ini. Permasalahan penelitian tidak dapat diberlakukan secara umum pada daerah lain dengan kondisi sosial budaya yang berbeda.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*):** Pengembangan penelitian terkait netralitas asn dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum penting untuk terus diperbarui sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat serta ilmu pengetahuan. Penelitian masa depan dapat dilakukan dengan menggunakan metode baru yang lebih efisien dan akurat dalam pengumpulan maupun analisis data.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih dengan hormat kepada pihak yang telah terlibat dalam penelitian, utamanya Camat Bantur, Kepala Desa Karang Sari, serta Perangkat Desa Karang Sari. Tak kalah penting juga diucapkan terima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dukungan moral maupun emosional selama proses penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Sugiono, P., D. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 2014.
- Yuliani. *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling*. Quanta, 2018.
- Endang Komara. "Kompetensi Profesional Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) Di Indonesia, Jawa Barat." *Jurnal Indonesia Kajian Pendidikan*, 2019, 75.
- KASN. "Starategi Pengawasan Penegakan Netralitas (Impartiality) Aparatur Sipil Negara." *Komisi Aparatur Sipil Negara Policy Brief 2*, no. 4 (2019): 1–4.
- Mulyadi, Lilik. "Perlindungan Hukum Whistle-Blower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime Di Indonesia Masa Mendatang." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, no. 3 (2014): 578–97. <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a9>.
- Subiyanto, Achmad Edi. "Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai

Pembaruan Demokrasi Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 355.  
<https://doi.org/10.31078/jk1726>.

Tawakkal, George Towar Ikbal, Irma Fitriana Ulfah, Andi Setiawan, La Ode Machdani Afala, Andrew Douglas Garner, and Thomas R Seitz. “Makna Pemilu: Ketidakruntutan Arti Penting Pemilu Bagi Pemilih.” *CosmoGov* 7, no. 1 (2022): 1.  
<https://doi.org/10.24198/cosmogov.v7i1.29269>.

“Bawaslu Sumatera Barat Adakan Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu,” 2023. <https://sumbar.bawaslu.go.id/index.php/berita/page/256>

“*BAWASLU SUMBAR, AJAK MEDIA KONTROL DAN EDUKASI POLITIK DI TENGAH MASYARAKAT*,” n.d. <https://sumbar.bawaslu.go.id/index.php/berita/page/239>.

“Bawaslu Sumbar Gelar Sosialisasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024,” n.d.  
<https://sumbar.bawaslu.go.id/index.php/berita/page/244>.

“Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024,” n.d.  
<https://sumbar.bawaslu.go.id/index.php/berita/page/254%0A>.

“<https://Penerbitdeepublish.Com/Metode-Penelitian-Kualitatif/>,” n.d.  
<https://Penerbitdeepublish.Com/Metode-Penelitian-Kualitatif/>

“Jaga Netralitas ASN Di Sumatera Barat, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Rangkul Kepala Daerah Tandatangani Pakta Integritas.” Accessed November 30, 2023.  
<https://sumbar.bawaslu.go.id/index.php/berita/page/207>.

“Mengawasi Dari Tengah Samudera.” Accessed November 30, 2023.  
<https://sumbar.bawaslu.go.id/index.php/berita/page/260%0A>.

“Meningkatkan Partisipasi Civitas Akademika Di Sumatera Barat, Melalui Kerja Sama Antarlembaga Dalam Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024,” n.d.  
<https://sumbar.bawaslu.go.id/index.php/berita/page/221>.

“Pentingnya Penyusunan Kajian Hukum, Bawaslu Provinsi Lakukan Supervisi Dan Monitoring Ke Bawaslu Kabupaten/Kota,” n.d.  
<https://sumbar.bawaslu.go.id/index.php/berita/page/255>.

<https://bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-bahas-konsep-penanganan-pelanggaran-netralitas-asn-dalam-pemilu>